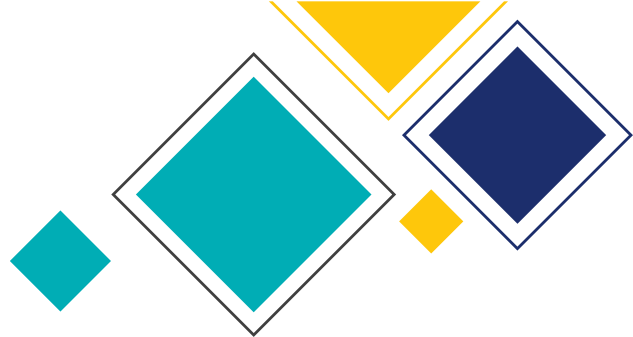




BAPENDA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PAJAK KITA, UNTUK KITA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2025

Disusun Oleh :
Badan Pendapatan Daerah



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat ini disusun sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah.

Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan, baik dari sisi teknis penyusunan maupun kualitas dan kelengkapan data. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 23 Jan 2026

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan anggaran.

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024–2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024–2026 maka yang menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu :

a. Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Tujuan : Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Target Kinerja : 6%

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Pendapatn Asli Daerah (PAD)

Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD

Target Kinerja : 6%

Dari indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan pada tahun 2025, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :

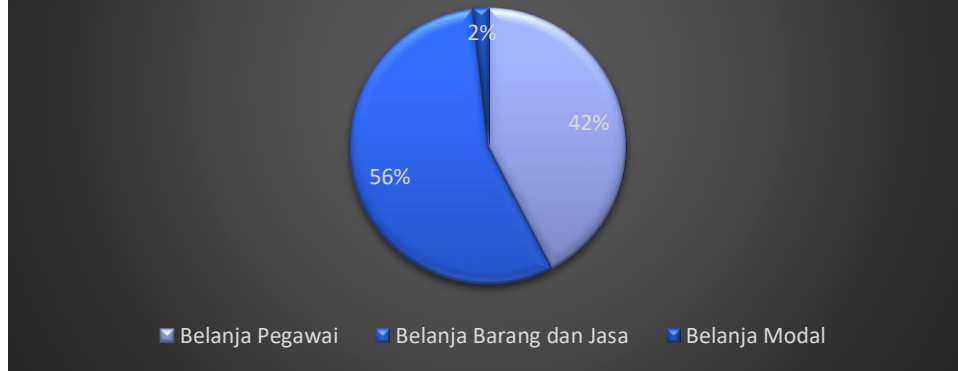
- a. Capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	6%	127,90%

Pada capaian sasaran strategis, peningkatan realisasi penerimaan sebesar 127% yang jauh melampaui target 6% yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal terkait pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan pemberlakuan Opsen PKB serta BBNKB sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025. Akibatnya, kendaraan bermotor dengan kode seri Kabupaten Lampung Barat yang membayar PKB atau melakukan Balik Nama dikenakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 5.981.584.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.682.121.842,-** atau 94,99% dengan komponen anggaran belanja terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 34.799.009.765 Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.541.401.500 atau sebesar 66,26% Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.338.083.300 atau sebesar 32,85% dan Belanja Modal sebesar Rp. 102.100.000 atau sebesar 2,02%

Grafik Komponen anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025



Demikian disampaikan LKjIP tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah menetapkan kebijakan nasional di bidang akuntabilitas kinerja melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kebijakan tersebut menjadi kerangka kerja dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur mekanisme perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP dirancang sebagai sistem manajemen kinerja yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Melalui sistem ini, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mengukur dan melaporkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terstruktur, terukur, dan berkesinambungan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Keterpaduan tersebut dimaksudkan untuk memastikan konsistensi perencanaan dan keselarasan capaian kinerja lintas tingkat pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, diperlukan sistem pertanggungjawaban kinerja yang memiliki kejelasan tujuan, indikator yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada hasil, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu melakukan penguatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Penguatan



kinerja tersebut diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi fungsi perangkat daerah sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen pelaporan atas pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran untuk menyajikan informasi kinerja secara komprehensif, yang meliputi tingkat pencapaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja utama, serta evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Keuangan.

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta tugas pembantuan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta tugas pembantuan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pajak dan retribusi daerah serta tugas pembantuan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta tugas



pembantuan; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan pendataan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan penetapan dan penagihan pajak dan retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengembangan pajak dan retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

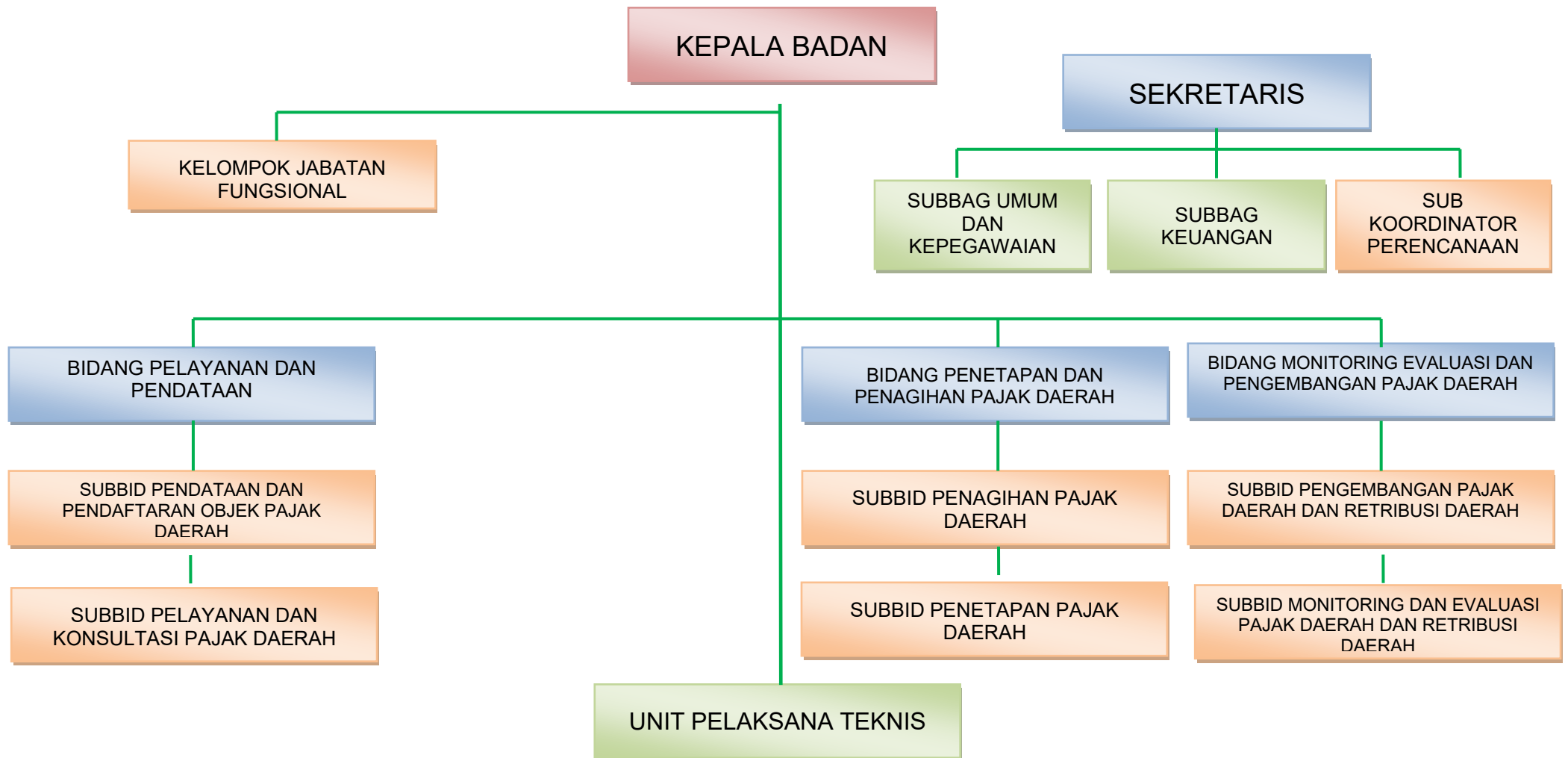
C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Koordinator Perencanaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan dan Pendataan, Bidang Penetapan dan penagihan pajak daerah dan Bidang Monitoring evaluasi dan pengembangan pajak daerah.



Tabel 1.1
Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Lampung Barat





D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan. Peran ini dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah berperan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Kegiatan ini meliputi pemutakhiran dan validasi data objek serta subjek pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pemungutan pendapatan daerah agar lebih efektif dan efisien.

Selain berfokus pada optimalisasi pendapatan, Badan Pendapatan Daerah juga berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di bidang pendapatan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah turut berperan dalam memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pemungutan. Penguatan sistem ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, meningkatkan akurasi data, serta memastikan pencapaian target pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi dan peningkatan kompetensi aparatur menjadi



kunci dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian kinerja pemerintahan daerah.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan kondisi atau permasalahan penting yang harus ditangani secara terencana dan berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dapat berjalan optimal. Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun isu strategis yang dihadapi Bapenda Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Fungsi dan Peran Badan Pendapatan Daerah

Optimalisasi fungsi Bapenda sebagai perangkat daerah pengelola pendapatan perlu ditingkatkan, khususnya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah. Hal ini mencakup penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta peningkatan efektivitas regulasi dan sistem pengelolaan pendapatan.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya tergali secara optimal. Masih terdapat objek dan subjek pajak serta retribusi daerah yang belum terdata dengan baik, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi PAD. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat masih sangat bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat saat ini juga tengah menghadapi efisiensi anggaran, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah menjadi sebuah keharusan agar pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tidak terhambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak

Kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sistem



Badan Pendapatan Daerah

pelayanan berbasis teknologi informasi, prosedur yang belum sepenuhnya sederhana, serta kebutuhan peningkatan profesionalisme aparatur. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis OPD Tahun 2024-2026, termasuk Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui Renstra ini, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penguatan tata kelola pengelolaan pendapatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah. Seluruh tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan secara terukur agar dapat dievaluasi capaian kinerjanya setiap tahun.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah juga memuat arah kebijakan dan strategi yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem dan regulasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja, Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran. Dengan demikian, keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dapat



terjaga secara konsisten, sehingga pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Renstra juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil.

Renstra 2024-2026 Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat ini dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan daerah di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah adalah **“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”**; Selanjutnya, Sasaran daerah yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Pendapatan Perkapita”**;

Berdasarkan Tujuan dan sasaran daerah di dalam RPD tersebut Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Adalah

“Meningkatnya Kemandirian Daerah”

Selanjutnya, Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut, Strategi dan arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Dapat dilihat pada tabel Berikut:



Tabel 2.1 Strategi dan arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan pendataan objek pajak baru serta memaksimalkan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.	Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator dan target kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%	6	6	6

Sumber data : Renstra Badan pendapatan Daerah 2024 – 2026



b. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Pendapatan Daerah.

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun



2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja utama dan program yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



Adapun Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET		
				FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%	Jumlah Anggaran PAD tahun ini dikurangi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dibagi Jumlah Anggaran PAD tahun lalu dikali 100%	APBD dan APBDP	6	6	6

Sumber data : IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran Rp. **6.998.205.996** dan pada DPA-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 pagu Anggaran menjadi Rp. **5.981.584.800**

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2.5
Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Murni	Target Capaian		Pagu APBD Murni (Rp.)	Pagu APBD Perubahan (Rp.)
2	3	4		5	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BAPENDA	70,68		3.101.788.396	3.288.447.800
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 11 Dokumen - 5 Dokumen - 12 Dokumen		43.326.100	58.390.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	16.713.500	31.777.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.823.800	5.823.800



Badan Pendapatan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.363.000	3.363.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.224.400	6.224.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.261.400	6.261.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.820.000	1.820.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	3.120.000	3.120.000
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- 20 Orang/Bulan - 1 Laporan - 4 Laporan - 1 Dokumen		2.263.067.846	2.550.141.500



Badan Pendapatan Daerah

	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/ Bulan	2.254.327.846	2.254.327.846
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.450.000	3.450.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan	2.815.0000	2.815.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.475.000	2.475.000
Kegiatan : Administrasi Barang Milik	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik	1	Laporan	4.402.000	4.402.000



Badan Pendapatan Daerah

Daerah pada Perangkat Daerah	Daerah pada Perangkat Daerah				
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.402.000	4.402.000
Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan		66.430.000	29.485.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		66.430.000	29.485.000
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 3 Orang		43.326.100	29.370.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1.8625.000	10.120.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	15.000.000	19.250.000



Badan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 12 Laporan - 12 Laporan	126.738.400	183.428.4000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.575.000	1.575.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.030.600	19.030.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.860.000	7.860.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.059.000	11.059.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	87.213.800	143.903.800



Badan Pendapatan Daerah

dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5	Unit	103.850.000	92.100.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	1	Unit	12.000.000	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	91.850.000	92.100.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 12 Laporan - 12 Laporan - 12 Laporan		138.001.300	118.976.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.750.000	4.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	57.060.000	36.185.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	75.191.300	78.041.300
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	47	Unit	322.347.750	222.154.500



Badan Pendapatan Daerah

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	261.100.00	171.550.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	11.300.000	11.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	49.947.750	39.304.500
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%		140.803.000	113.043.000
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 4	Dokumen	95.042.00	68.185.000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	4	Dokumen	95.042.00	68.185.000
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1	Dokumen	45.761.000	44.858.000



Badan Pendapatan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang TimbulAkibar Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang TimbulAkibar Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	Dokumen	45.761.000	44.858.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Realisasi PAD	-100%		3.755.614.600	2.580.094.000
	- Persentase Realisasi PBB	-100%			
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase Realisasi PAD -	100	%	3.755.614.600	2.580.094.000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen	418.372.000	215.177.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	332.637.000	126.728.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50	Unit	47.028.000	57.585.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan	562.050.000	457.555.000



Badan Pendapatan Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan	496.950.000	486.205.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200	Objek Pajak	397.371.600	343.775.600
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	Dokumen	236.836.000	162.373.400
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan	272.415.000	102.280.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16	Dokumen	117.497.000	50.161.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Dokumen	537.159.000	282.887.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen	56.891.000	42.375.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	Laporan	280.408.0000	252.992.000

Sumber data : DPA Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat



C. Target Kinerja Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan.

Terdapat satu sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome program dan kegiatan yang diselenggarakan. Adapun target sasaran strategis, program dan kegiatan tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target sasaran strategis Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	%	6

Sumber data : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BAPENDA	70,68	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 11 Dokumen - 5 Dokumen - 12 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 20 Orang/Bulan - 1 Laporan - 4 Laporan - 1 Dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/ Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 3 Orang	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 12 Laporan - 12 Laporan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5 Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	- 12 Laporan - 12 Laporan - 12 Laporan



	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase Piutang Daerah	- 100% - 100%	
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 4	Dokumen
Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi	4	Dokumen



Anggaran Pendapatan	Perencanaan Anggaran pendapatan		
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- 1	Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang TimbulAkibar Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang TimbulAkibar Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1	Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Realisasi PAD - Persentase Realisasi PBB	-100% -100%	
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase Realisasi PAD -	100	%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50	Unit
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan



Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200	Objek Pajak
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2	Dokumen
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Konsultasi Pajak Daerah	1	Layanan
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16	Dokumen
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10	Dokumen
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	Laporan

Sumber data : DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, karena aparatur menjadi penggerak utama dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah, diperlukan ketersediaan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Pada saat ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemungutan, pengawasan, dan optimalisasi pajak daerah serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat masih didukung oleh sumber daya aparatur yang jumlah dan kapasitasnya relatif terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pencapaian target pendapatan daerah, sehingga ke depan diperlukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui penataan kelembagaan, pengembangan kompetensi aparatur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja.

Pada tahun 2025 Badan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 20 orang Aparatur Sipil Negara dengan rincian 15 Orang Pegawai Negeri Sipil serta 5 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Laki-Laki	: 12 Orang
Pegawai Perempuan	: 8 Orang



Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Jika dilihat Menurut Golongan Ruang maka Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
3	Pembina	IV/a	2 orang
4	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
5	Penata	III/c	2 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	- orang
7	Penata Muda	III/a	1 orang
8	Pengatur Tk. I	II/d	- orang
9	Golongan IX		4 orang
10	Golongan V		1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Tingkat Pendidikan seorang pegawai juga menentukan berkembangnya atau majunya suatu organisasi, pada Badan Pendapatan Daerah, tingkat pendidikan rata-rata pegawai adalah sarjana, dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2
Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	5 orang
2	Sarjana	14 orang
3	SMA	1 orang

Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Formasi Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2024

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan	1 orang	Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	➤ Kabid. Pelayanan dan Pendataan		Ada
	➤ Kabid. Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Ada
	➤ Kabid. Penetapan dan Penagihan pajak daerah		Ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	Ada
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	2 orang	Ada
6	Kasubid Pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah	1 orang	Ada
	Kasubid pendataan pendaftaran objek pajak daerah	1 orang	Ada
7	Kasubid Monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah	1 orang	Ada
8	Kasubid pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 orang	Ada
9	Kasubid penagihan pajak daerah	1 orang	Ada
10	Kasubid penetapan Pajak daerah	1 orang	Ada
11	Analisis Pendapatan Daerah	1 orang	Ada



12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang	Ada
13	Penata layanan operasional	3 orang	Ada
14	Pengadministrasian Perkantoran	1 orang	Ada

Sumber data : Data Kepegawaian Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

Berdasarkan jumlah sumberdaya manusia yang ada, secara kuantitatif sudah sesuai dengan kebutuhan struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Namun untuk memaksimalkan kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibidang Pendapatan Keuangan.diperlukan penambahan Pegawai ASN, dengan salah satu upayanya yaitu menyusun kebutuhan pegawai melalui Anjab ABK.

B. ANALISIS SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif, ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, khususnya dalam mendukung pencapaian kinerja. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.1 Daftar sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Tahun 2025

NAMA BARANG	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG
Windows Server	Server PBB	1
UPS GT 600	Pendapatan	1
UPS APC	Pendapatan	1
UPS 10 KVA	Server PBB	1
UPS	Server PBB	1
Tiang V Banner	Seluruh Kab. Lampung Barat (Pendapata	36
Televisi	Pelayanan PBB	1
Switch/Hub TP Link TL 561008	Server PBB	2
Switch 24 Port	PBB	1
Stavol	Server PBB	1
Stand Mic Meja	Aula	2



Badan Pendapatan Daerah

Stand Mic	Aula	1
Stabilizer Red Star	Pelayanan PBB	1
Stabilizer Red Star	Aula	1
Stabilizer 3000 VA	PBB	1
Speaker	Aula	1
Speaker	Aula	1
Sound System	Aula	1
Sofa	Pelayanan PBB	1
Server e-BPHTB	Server PBB	1
Server Aplikasi Sismiop dan Operating System	Server PBB	1
Sepeda Motor	Kawasaki/KLX/BE 6156 MZ	1
Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 G/BE 6314 MZ	1
Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 G/BE 6303 MZ	1
Sepeda Motor	Yamaha/Scorpio Z/BE 5923 MZ	1
Sepeda Motor	Honda/Supra X/BE 6253 MZ	1
Sepeda Motor	Yamaha/Vega RR/BE 6199 MZ	1
Sepeda Motor	Suzuki/Shogun/BE 5648 MZ	1
Sepeda Motor	Honda/MCB WIN/BE 5236 MZ	1
Sepeda Motor	Honda/MCB WIN/BE 5299 MZ	1
Scanner Epson D3410	PBB	1
Rak Arsip	Pendapatan	2
Printonix	Server PBB	1
Printer Printonix P8010	Server PBB	1
Printer Laser Jet P 1005	Pendapatan	2
Printer Epson LQ 2190	Pendapatan	1
Printer Epson LQ 2190	Pendapatan	2
Printer Epson L3520	PBB	1
Printer Epson L220	Pendapatan	2
Printer Epson (Loby Pendapatan)	Pelayanan PBB	1
Printer Canon	Pendapatan	1
Printer	Server PBB	1
Podium	Aula	1
Pick Up	Toyota/Hilux/BE 8013 MZ	1
Pick Up	Isuzu/Phanter/BE 8057 MZ	1
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT)	130.000
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT)	7.186
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT)	9.948
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT)	15.087
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Tanda Setoran (STTS)	130.000
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Tanda Setoran (STTS)	7.500
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Tanda Setoran (STTS)	10.400
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Surat Tanda Setoran (STTS)	16.524
Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	DHKP PBB	1.100
Oracle Database standart-license dan Oracle database ATS	Server PBB	15
Notebook Lenovo Yoga 510	Pendapatan	1
Notebook Lenovo Yoga 510	Pendapatan	1
Notebook Asus	Pendapatan	1
Monitor Samsung	Pendapatan	1
Mobile Pos (Pembayaran E-Ticketing)	Kebun Raya Liwa (Pendapatan)	1
Mobile Filling Kabinet	Pendapatan	1
Minibus	Daihatsu/Terios/BE 1703 MZ	1
Microsoft Visual Studio Pro	Server PBB	1
Mic Wireless	Aula	1
Mesin Tik Brother	Pendapatan	1



Badan Pendapatan Daerah

Mesin Penghancur Kertas Gemet 1000	Pelayanan PBB	1
Mesin Penghancur Kertas Gemet 1000	Pendapatan	1
Mesin Hitung Uang Secure	Pelayanan PBB	1
Meja Rapat 2 M	Aula	4
Meja Rapat 2 M	Aula	4
Meja Rapat	Aula	3
Meja Panjang	Pelayanan PBB	1
Meja Komputer	Pendapatan	1
Meja Komputer	Aula	1
Meja Komputer	Pendapatan	1
Meja Komputer	Pendapatan	1
Meja Bulat	Aula	7
Meja 1/2 Biro	Aula	1
Meja 1/2 Biro	Lobby Pendapatan	1
Meja 1/2 Biro	Pendapatan	4
Meja 1/2 Biro	Aula	1
Meja 1/2 Biro	Pelayanan PBB	1
Meja 1/2 Biro	Pelayanan PBB	1
Meja 1/2 Biro	PBB	2
Meja 1/2 Biro	Server PBB	3
Meja 1 Biro	Pendapatan	3
Meja 1 Biro	PBB	3
Mafinpo Profesional	Server PBB	1
Lemari TV	Pelayanan PBB	1
Lemari Besi / Metal	Pendapatan	1
LCD Proyektor Infocus	Pendapatan	1
LCD 17 "	Server PBB	1
Layar Tripod Infocus	Aula	1
Laptop Lenovo AMD R5 5500 2,1 Ghz Ram 16 GB	Pendapatan	1
Laptop Asus 416 17-1065 Ram 8Gb	PBB	1
Laptop Acer Aspire 5/i3 VGA A514 -54G	Pendapatan	1
Laptop	PBB	1
Laptop	PBB	1
Kursi Tunggu (Luar)	Pelayanan PBB	1
Kursi Tunggu (Luar)	Pelayanan PBB	1
Kursi Tunggu (Luar)	Pelayanan PBB	1
Kursi Tunggu	Pelayanan PBB	1
Kursi Tunggu	Entry	1
Kursi Putar Savello	Pelayanan PBB	3
Kursi Putar Savello	Pendapatan	1
Kursi Putar Savello	Server PBB	2
Kursi Putar Savello	Pendapatan	5
Kursi Putar Savello	PBB	5
Kursi Putar Savello	Pelayanan PBB	3
Kursi Putar (Kabid)	Pendapatan	1
Kursi Putar	Pendapatan	1
Kursi Lipat	Pendapatan	5
Kursi Lipat	Pelayanan PBB	8
Kursi Lipat	Pendapatan	1
Kursi Lipat	Aula	6
Kursi Lipat	Aula	77
Kursi Lipat	Aula	2
Komputer PC	Pendapatan	1
Komputer Lenovo	Pendapatan	1
Komputer	Server PBB	3
Komputer	Pelayanan PBB	3
Jaringan Komputer	Pelayanan PBB	1
Jaringan Komputer	Server PBB	1
Internet developer suite-license dan IDS ATS	Server PBB	1



Badan Pendapatan Daerah

Instalasi Listrik	Jln. Tulip No. 09 Komplek Pemda	1
Hub	Pelayanan PBB	1
Hard Disk External	Pendapatan	1
Hard Disk External	Pendapatan	1
Hard Disk External	PBB	1
GPS	Bidang PBB	1
Gordyn Gedung Aula	Aula	7
Filling Kabinet Lion	Pendapatan	1
Filling Cabinet	Pendapatan	3
Filling Cabinet	PBB	3
Close Rack Server	Server PBB	1
Brankas Fire Safe With Alarm	Pendapatan	1
Billboard PBB (BNS, Suoh dan Pagar Dewa)	BNS, Suoh, Pagar Dewa	3
Baring Swing Gate (Pintu Masuk/Keluar)	Kebun Raya Liwa (Pendapatan)	1
Bangunan Gedung Kantor PBB	Jln. Tulip No.09 Komplek Pemda	1
Baliho	Kebun Tebu	1
Baliho	Sekincau	1
Baliho	Sindalapai	1
Baliho	Sukau	1
Baliho	Pampangan	1
Bak Penampung Air	Jln. Tulip No.09 Komplek Pemda	1
Aula Bapenda	Jln. Tulip No.09 Komplek Pemda	1
Aplikasi PM Santun	Pendapatan	1
Aplikasi E-Ticketing	Kebun Raya Liwa (Pendapatan)	1
Air Conditioner Panasonic	Pelayanan PBB	1
Access Point (TP Link EAP 225 AC 1350)	Aula	1
Access Point	Server PBB	1
Access Point	Pelayanan PBB	1
Acces Switch	Pelayanan PBB	1
AC Spllit 1 PK Panasonic	Server PBB	1
AC Polytron	Aula	4

Sumber data : Data Aset Bapenda Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

C. ANALISIS DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2025

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.981.584.800,-** (*Lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,99% atau sebesar **Rp. 5.682.121.842,-** (*Lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).



Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pagu anggaran bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD Tahun 2025, alokasi dana diperuntukan kegiatan di 4 (tiga) bidang yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan dan Pendataan
3. Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Bidang Penetapan dan Penagihan pajak daerah

Tabel 3.5.

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Jenis Belanja	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 35.444.924.989	Rp. 34.799.009.765
2.	Belanja Pegawai	Rp. 2.254.327.846	Rp. 2.541.401.500
3.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.630.028.150	Rp. 3.338.083.300
4.	Belanja Modal	Rp. 113.850.000	Rp. 102.100.000
Jumlah		Rp. 6.998.205.996	Rp.5.981.584.800,-



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU diawali dengan penentuan kinerja utama instansi pemerintah yang bersangkutan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan demikian, IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, serta menjadi alat untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja instansi secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil.

Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui penyajian informasi yang transparan dan akuntabel mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun berjalan, capaian tahun sebelumnya, serta target jangka menengah. Hasil pengukuran tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Sasaran Strategis sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 hingga tahun 2026 yang sekaligus merubah tujuan sasaran serta indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Perubahan ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Lampung



Barat, adapun indikator kinerja utama serta target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	6%	126,06%

Sumber data : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dengan Indikator sasaran “Persentase Peningkatan PAD”

Target indikator ini merupakan tolok ukur atas upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, efektif, dan efisien, melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang terintegrasi. Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi potensi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan dan pelaporan pendapatan daerah, sehingga dapat mendukung terwujudnya kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Barat.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari target yang telah ditetapkan sebesar 6% Pendapatan asli daerah sebagai Indikator Kinerja utama teralisasi 126,06% yang artinya terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 2101 %.

Adapun faktor-faktor pendukung yang mendorong peningkatan realisasi target kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, antara lain:

- a. Adanya peningkatan Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 mencapai 126,06%, jauh melampaui target kinerja sebesar 6% yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat



disebabkan oleh beberapa faktor kebijakan. Sejak Mei 2025, sejalan dengan pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen PKB dan BBNKB). Kebijakan tersebut mengakibatkan kendaraan bermotor dengan kode seri Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pembayaran PKB maupun proses Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan tambahan dimaksud dicatat dan dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- b. untuk memaksimalkan penyerapan Opsen PKB-BBNKB Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan UPTD Samsat kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga memaksimalkan penggunaan Media sosial, media cetak serta media elektronik untuk melakukan sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, selain itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat membantu meminjamkan peralatan serta menempatkan beberapa pegawai pada UPTD Samsat Liwa untuk membantu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat juga terus melakukan intensifikasi penyerapan pajak daerah lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan terus memaksimalkan sosialisasi dengan berbagai media dan platform serta terus memaksimalkan penagihan pajak daerah dengan berbagai upaya baik penagihan secara langsung ataupun dengan memanfaatkan aplikasi Pajak Mandiri-sistem aplikasi non tunai (PM-SANTUN);
- d. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah juga terus melakukan upaya ekstensifikasi dengan melakukan kegiatan pendataan objek pajak daerah baru. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga berdampak peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



- e. Untuk memaksimalkan penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Badan Pendapatan Daerah juga memberikan hadiah Luns PBB terbaik bagi Pekon/Kelurahan dan juga Kecamatan.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1. Bidang Pelayanan dan Pendataan

Bidang Pelayanan dan Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan serta optimalisasi pendataan pajak dan retribusi daerah. Pelayanan diberikan kepada masyarakat melalui penerimaan pendaftaran wajib pajak baru, pembaruan data objek dan subjek pajak, serta pemberian informasi dan konsultasi terkait kewajiban perpajakan daerah. Pelaksanaan pelayanan dilakukan baik secara langsung di kantor maupun melalui koordinasi dengan aparat pekon, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka memperluas basis data perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sosialisasi pendataan melalui aparat pekon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat pekon mengenai pentingnya pendataan objek dan subjek pajak, serta mendorong peran aktif aparat pekon dalam mengidentifikasi potensi objek pajak baru di wilayahnya. Melalui sosialisasi tersebut, aparat pekon diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan daerah dan membantu proses pendataan awal terhadap wajib pajak baru, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Pendataan yang dilakukan memperhatikan keterkaitan antara objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak. Objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak harus teridentifikasi dengan jelas, subjek pajak sebagai pihak yang memiliki atau memanfaatkan objek pajak perlu didata secara tepat, dan selanjutnya ditetapkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan data antara objek dan subjek pajak menjadi faktor penting dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah secara optimal serta mencegah terjadinya kehilangan potensi pendapatan.



DATA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK BARU 2025

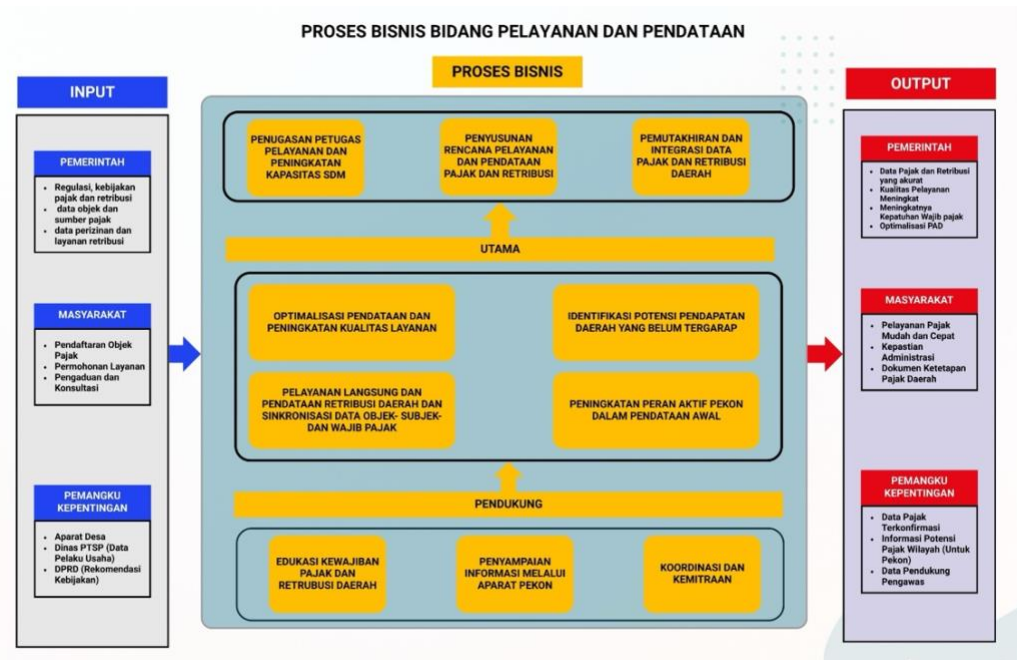
No	Jenis Pajak Daerah	Per Maret	Per September	Penambahan jumlah wajib pajak
1	Pajak Makanan dan /Minuman	135	253	118
2	Pajak Perhotelan	13	21	8
3	Pajak Reklame	9	34	25
4	Pajak Parkir	15	17	2
5	Pajak Hiburan	-	2	2

Sumber: Data Pajak Barang dan jasa tertentu (BJPT) Badan Pendapatan Daerah 2025

Selain pajak daerah, kegiatan pendataan juga diarahkan untuk menggali potensi retribusi daerah yang belum tergarap secara maksimal. Pendataan dilakukan terhadap berbagai layanan dan perizinan yang menjadi objek retribusi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar data yang valid dalam menetapkan kebijakan pemungutan retribusi. Dengan tersedianya data yang lengkap dan mutakhir, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendataan didukung oleh adanya regulasi daerah yaitu peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang menjadi landasan pemungutan pajak dan retribusi, peran aktif aparat pekon dalam membantu sosialisasi dan pendataan di lapangan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala dan GAP, antara lain masih adanya objek pajak dan retribusi yang belum terdata secara optimal, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendataan lapangan, perbedaan tingkat pemahaman aparat pekon dan masyarakat terhadap regulasi perpajakan daerah, serta data wajib pajak yang belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkala. Kendala dan GAP tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi pelayanan dan pendataan pada periode berikutnya.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, berikut ditampilkan peta proses bisnis Bidang Pelayanan dan Pendataan:



Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah dan Pendataan Objek Pajak



2. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah

Bidang Penetapan dan Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penetapan besaran pajak terutang serta optimalisasi penagihan kepada subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah objek pajak dan subjek pajak yang menjadi dasar penetapan dan penagihan dapat dipantau melalui aplikasi PM Santun, yang berfungsi sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan data pajak daerah. Melalui aplikasi tersebut, petugas dapat mengetahui secara rinci data objek pajak, subjek pajak, status pembayaran, serta daftar subjek pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayarannya.

The image shows two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets. The left spreadsheet is titled 'DATA SPTPD RESTORAN 20...' and contains a list of tax subjects with columns for NO, NAMA, JENIS USAHA, and ALAMAT. The right spreadsheet is titled 'rekap tagihan REGULER' and shows a summary of tax payments with columns for NO, NAMA, NAMA USAHA, JENIS USAHA, ALAMAT, and KECAMAH.

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT	KECAMAH
0001	KAMAL	RESTORAN SAHABAT UTAMA	GUNUNG SUGIH	BALIK BUKIT
0002	ABU BAKAR	RESTORAN 245	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0003	SUHARBI	RESTORAN DUDU LALI	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0004	A. IWAN RIADI	RESTORAN MERASA	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT
0005	WIMARNI	RESTORAN SARI RASA	SUKA MENANTI	BALIK BUKIT
0006	KALINDO	RM. KALINDO	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0007	PAMAMEN	RM. NYAM BAKAR PAK MIN	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0008	CEP HARJA	RM. CEP HARJA	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0009	BINGAN	RM. BINGAN	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0010	RUCI HARTONO	RM. DWI PUTRI	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT
0011	SUKIMAN	RM. HOANGAN KITA	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0012	JOHAN MARYANTO	RM. LESEHAN LAWAJ	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT
0013	AA. LAKSANA	RM. BATAGOR	IWAY MANGAKU, BALIK BUKIT	BALIK BUKIT
0014	AYLINI	RM. AYLINI	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0015	HENDRI UTAMA	RM. GIGIN	SEBARUS	BALIK BUKIT
0016	AHMAD MAKSUM	RM. JEJAMA	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0017	BU LINDA	RM. AMANDA	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0018	HARNANDA	RM. ANANH MINANG	WATAS	BALIK BUKIT
0019	AKADIR	WM. WARSUN	SEBARUS	BALIK BUKIT
0020	SUGIANTO	WM. GITO	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0021	BULUNG	WM. SAKATO	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0022	SRI	WM. SRI	IWAY MANGAKU, BALIK BUKIT	BALIK BUKIT
0023	MEINI	WM. KATERING KITA	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0024	RUBINI	WM. PEMPEK RUBINI	PASAR LIWA, BALIK BUKIT	BALIK BUKIT
0025	MBAK YAH	WM. MBEK YAH	TANJUNG RAYA	BALIK BUKIT
0026	MULYANTO	WR. BAKSO TIRTOMOYO	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0027	YANTO	WM. MAS YANTO	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0028	SALINDO	WM. SAKATO	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0029	IRIANTO	WM. IRIANTO	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT
0030	SARKA	WARUNG BAKSO SARKA	PASAR LIWA	BALIK BUKIT
0031	FATONI	WARUNG BAKSOMIE FATONI	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0032	PULIANTO	WARUNG BAKSO AGUNG	KUBU PERAHU	BALIK BUKIT
0033	UMAR	WR. BAKSO BEWOK	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0034	WIRDA YULI	WR. MPEK MPEK KITO	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT
0035	SUNANDA	WM. SATE KELINCI	IWAY MANGAKU	BALIK BUKIT

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah- Daftar Penagihan Subjek Pajak 2025

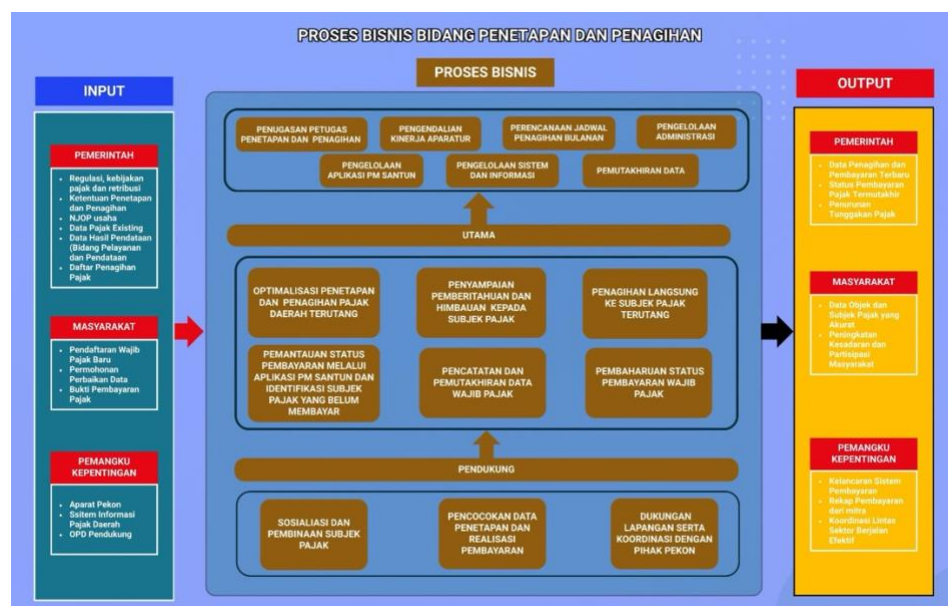
Penagihan pajak dilakukan secara rutin setiap bulan kepada subjek pajak yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan masa pajak yang telah ditetapkan. Kegiatan penagihan dilaksanakan melalui pemberitahuan, imbauan, serta penagihan langsung kepada subjek pajak, baik di lokasi usaha maupun melalui koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan subjek pajak sekaligus mengamankan penerimaan pajak daerah agar dapat terealisasi sesuai target. Subjek pajak yang ditagih selanjutnya melakukan pembayaran pajak daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu dengan pembayaran secara tunai (cash) kepada petugas yang berwenang atau melalui transfer langsung ke rekening kas daerah. Mekanisme pembayaran tersebut



Badan Pendapatan Daerah

memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi subjek pajak, sekaligus menjamin bahwa penerimaan pajak tercatat secara sah dan akuntabel dalam sistem keuangan daerah. Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan pajak daerah didukung oleh ketersediaan aplikasi PM Santun sebagai sistem informasi pendataan dan penagihan, adanya regulasi yang jelas terkait penetapan dan penagihan pajak daerah, serta dukungan aparatur penagih yang melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Selain itu, kerja sama dengan aparat pekon dan meningkatnya kesadaran sebagian subjek pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah turut menjadi faktor pendukung dalam kelancaran kegiatan penagihan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala dan GAP, khususnya terkait subjek pajak yang belum memiliki kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak tepat waktu. Masih terdapat subjek pajak yang menunda pembayaran dengan berbagai alasan, keterbatasan kemampuan ekonomi, maupun kurangnya pemahaman terhadap sanksi perpajakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia penagih, jarak dan kondisi wilayah, serta belum optimalnya penegakan sanksi administrasi menjadi tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak daerah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah untuk memperkuat strategi penetapan dan penagihan, baik melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan subjek pajak, maupun penguatan sistem dan koordinasi lintas sektor pada periode selanjutnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, berikut ditampilkan peta proses bisnis Bidang Penetapan dan Penagihan:





Sumber: Dokumentasi Kegiatan penagihan Pajak Daerah

3. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bidang Penetapan dan Penagihan. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala dengan menganalisis data realisasi penerimaan, tingkat kepatuhan subjek pajak, serta efektivitas pelaksanaan penagihan yang tercatat dalam sistem dan laporan penagihan. Hasil monev digunakan sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi difokuskan pada identifikasi potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal, ketidaksesuaian data antara objek dan subjek pajak, serta kendala yang dihadapi dalam proses penagihan di lapangan. Melalui analisis laporan penagihan, Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan dapat mengetahui pola keterlambatan pembayaran, sektor usaha dengan tingkat kepatuhan rendah, serta wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan rekomendasi perbaikan

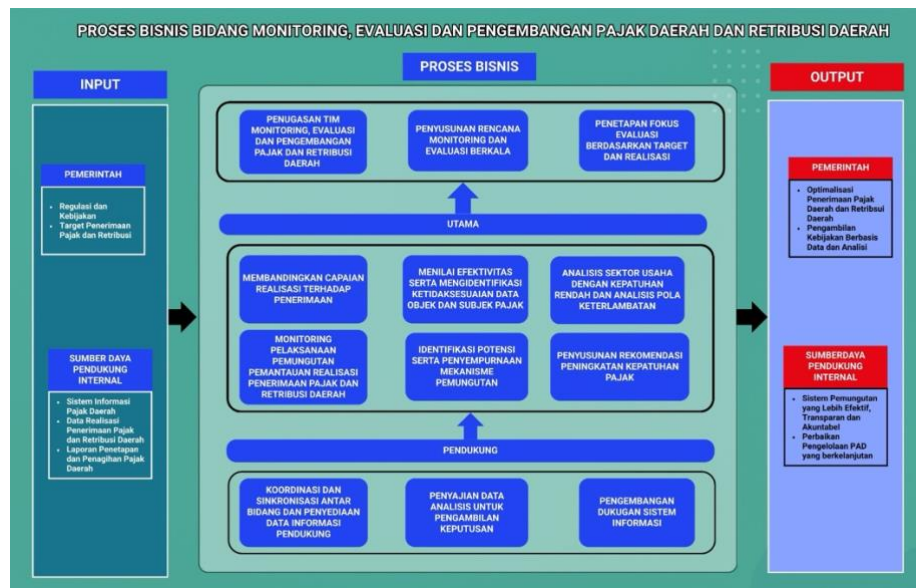


kepada bidang terkait guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi, bidang monev juga berperan dalam pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan daerah. Pengembangan dilakukan melalui kajian terhadap regulasi pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan mekanisme pemungutan, serta usulan inovasi pelayanan dan sistem pendataan berbasis teknologi informasi. Upaya pengembangan tersebut bertujuan untuk memperluas basis pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan subjek pajak, serta menciptakan sistem pemungutan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengembangan didukung oleh tersedianya laporan penagihan yang disusun secara rutin oleh Bidang Penetapan dan Penagihan, dukungan data dari sistem informasi perpajakan daerah, serta koordinasi antarbidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Komitmen pimpinan dan dukungan regulasi daerah juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala dan GAP, antara lain keterbatasan kualitas dan ketepatan waktu laporan dari bidang terkait, data yang belum sepenuhnya terintegrasi antar sistem, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan analisis dan pengembangan kebijakan secara komprehensif. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan subjek pajak yang fluktuatif turut mempengaruhi efektivitas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Kendala dan GAP tersebut menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan pengembangan pajak daerah serta retribusi daerah pada periode selanjutnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja, berikut ditampilkan peta proses bisnis Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:



Sumber: Dokumentasi Kegiatan Monev pengembangan Pajak Daerah

B. Perbandingan Kinerja

Untuk capaian Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dinyatakan tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan capaian target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja tahun 2025.

1. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 merupakan pencapaian kedua pada target Renstra periode 2024-2026. Untuk membandingkan kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya yaitu perbandingan dengan tahun 2024.



Tabel 4.2
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	
				2024	2025
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	6,03%	126,06%

Sumber data : Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator *Persentase Peningkatan PAD* pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp16.047.580.265,- Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada Tahun 2024 telah tercapai sesuai target.

Selanjutnya, pada Tahun 2025 dari target peningkatan sebesar 6%, realisasi peningkatan PAD mencapai Rp36.575.741.901,- atau sebesar 126,06%. Dengan demikian, capaian kinerja pada Tahun 2025 termasuk dalam kategori sangat berhasil karena melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Formula perhitungan capaian kinerja indikator *Persentase Peningkatan PAD* adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja (%) =

$$\frac{\sum \text{Realisasi PAD Tahun ini} - \sum \text{Realisasi Anggaran PAD tahun lalu}}{\sum \text{Realisasi Anggaran PAD tahun lalu}} \times 100$$

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 36.278.559.133} - \text{Rp.16.047.580.265}}{\text{Rp. 16.047.580.265}} \times 100\% = 126,06\%$$



2. Perbandingan capaian Kinerja dengan capaian kinerja tingkat provinsi Lampung

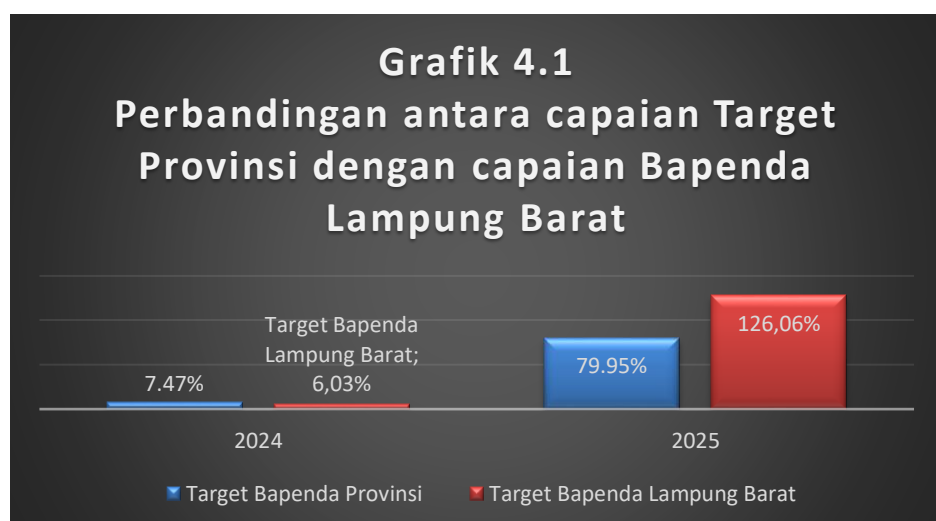
Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya yang sah, yang dikelola melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pemungutan, pengadministrasian, pengawasan, dan pelaporan pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Adapun pencapaian target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dibandingkan dengan Badan Pendapatan Provinsi Lampung pada periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan Target Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Provinsi Lampung				Lampung Barat			
		2024		2025		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan PAD	10,27%	7,47%	-	79,95%	6%	6,03%	6%	126,06%

Sumber data : LKJ Bapenda Provinsi Lsmpong

Jika dilihat dari Tabel bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah telah melebihi target capaian Provinsi Dapat pula digambarkan dalam grafik berikut :





C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 4.4
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja			Anggaran		Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	capaian	Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	6%	126,06%	2101%	Rp5.981.584.800	Rp5.682.121.842	5,01%

1. Perhitungan Persentase Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Substitusi angka:

$$\frac{Rp5.682.121.842}{Rp5.981.584.800} \times 100\% = 94,99\%$$

2. Perhitungan Nilai Efisiensi Anggaran (dalam Rupiah)

Efisiensi anggaran merupakan selisih antara pagu anggaran dan realisasi anggaran:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Anggaran} &= \text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran} \\ Rp5.981.584.800 - Rp5.682.121.842 &= Rp299.462.958 \end{aligned}$$

3. Perhitungan Persentase Efisiensi Anggaran

Persentase efisiensi anggaran dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi} = \frac{\text{Efisiensi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Substitusi angka:

$$\frac{Rp299.462.958}{Rp5.981.584.800} \times 100\% = 5,01\%$$

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu), maka tingkat efisiensinya dinilai tinggi, demikian pula sebaliknya.



Berdasarkan data pada tabel yang disajikan, menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat secara umum memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai efisiensi di atas 1 (satu). Hal ini didukung oleh realisasi anggaran yang rata-rata berada di atas 90%, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori “Sangat Baik” ($\geq 91\%$).

D. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.981.584.800** dan terealisasi sebesar 94,99% atau sebesar **Rp. 5.682.121.842,-** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

	PAGU APBD	PAGU PERUBAHAN	REALISASI
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp6.998.205.996,00	Rp5.981.584.800,00	Rp 5.682.121.842
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.101.788.396,00	Rp3.288.447.800,00	Rp 3.095.741.775
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp43.326.100,00	Rp58.390.100,00	Rp 58.370.100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp16.713.500,00	Rp31.777.500,00	Rp 31.757.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp5.823.800,00	Rp5.823.800,00	Rp 5.823.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp3.363.000,00	Rp3.363.000,00	Rp 3.363.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp6.224.400,00	Rp6.224.400,00	Rp 6.224.400
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp6.261.400,00	Rp6.261.400,00	Rp 6.261.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp1.820.000,00	Rp1.820.000,00	Rp 1.820.000



Badan Pendapatan Daerah

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.120.000,00	Rp3.120.000,00	Rp 3.120.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.263.067.846,00	Rp2.550.141.500,00	Rp 2.395.334.916
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.254.327.846,00	Rp2.541.401.500,00	Rp 2.386.594.916
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp3.450.000,00	Rp3.450.000,00	Rp 3.450.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp2.815.000,00	Rp2.815.000,00	Rp 2.815.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00	Rp 2.475.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp6.998.205.996,00	Rp4.402.000,00	Rp 4.402.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp4.402.000,00	Rp4.402.000,00	Rp 4.402.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp66.430.000,00	Rp29.485.000,00	Rp 29.410.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp3.101.788.396,00	Rp29.485.000,00	Rp 29.410.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp43.326.100,00	Rp29.370.000,00	Rp 29.370.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp18.625.000,00	Rp10.120.000,00	Rp 10.120.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp15.000.000,00	Rp19.250.000,00	Rp 19.250.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp126.738.400,00	Rp183.428.400,00	Rp 179.580.062
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.575.000,00	Rp1.575.000,00	Rp 1.575.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp19.030.600,00	Rp19.030.600,00	Rp 19.030.600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.860.000,00	Rp7.860.000,00	Rp 4.020.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp11.059.000,00	Rp11.059.000,00	Rp 11.059.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp87.213.800,00	Rp143.903.800,00	Rp 143.895.462



Badan Pendapatan Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp103.850.000,00	Rp92.100.000,00	Rp 91.900.000
Pengadaan Mebel	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp91.850.000,00	Rp92.100.000,00	Rp 91.900.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp138.001.300,00	Rp118.976.300,00	Rp 109.324.690
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.750.000,00	Rp4.750.000,00	Rp 4.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp57.060.000,00	Rp36.185.000,00	Rp 27.008.390
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp75.191.300,00	Rp78.041.300,00	Rp 77.566.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp322.347.750,00	Rp222.154.500,00	Rp 198.050.007
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp261.100.000,00	Rp171.550.000,00	Rp 147.445.507
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp11.300.000,00	Rp11.300.000,00	Rp 11.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.947.750,00	Rp39.304.500,00	Rp 39.304.500
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp140.803.000,00	Rp113.043.000,00	Rp 106.869.131
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp95.042.000,00	Rp68.185.000,00	Rp 62.011.131
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp95.042.000,00	Rp68.185.000,00	Rp 62.011.131
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp45.761.000,00	Rp44.858.000,00	Rp 44.858.000
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp45.761.000,00	Rp44.858.000,00	Rp 44.858.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp3.755.614.600,00	Rp2.580.094.000,00	Rp 2.479.510.936
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp3.755.614.600,00	Rp2.580.094.000,00	Rp 2.479.510.936
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Rp418.372.000,00	Rp215.177.000,00	Rp 213.018.690



Badan Pendapatan Daerah

Daerah			
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp332.637.000,00	Rp126.728.000,00	Rp 126.227.721
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp47.028.000,00	Rp57.585.000,00	Rp 55.110.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp562.050.000,00	Rp457.555.000,00	Rp 412.322.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp496.950.000,00	Rp486.205.000,00	Rp 484.905.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp397.371.600,00	Rp343.775.600,00	Rp 341.087.493
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp236.836.000,00	Rp162.373.400,00	Rp 162.372.900
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp272.415.000,00	Rp102.280.000,00	Rp 79.488.332
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp117.497.000,00	Rp50.161.000,00	Rp 50.106.063
Penagihan Pajak Daerah	Rp537.159.000,00	Rp282.887.000,00	Rp 282.855.112
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp56.891.000,00	Rp42.375.000,00	Rp 39.892.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp280.408.000,00	Rp252.992.000,00	Rp 232.125.625



E. Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah

1. PBB Online

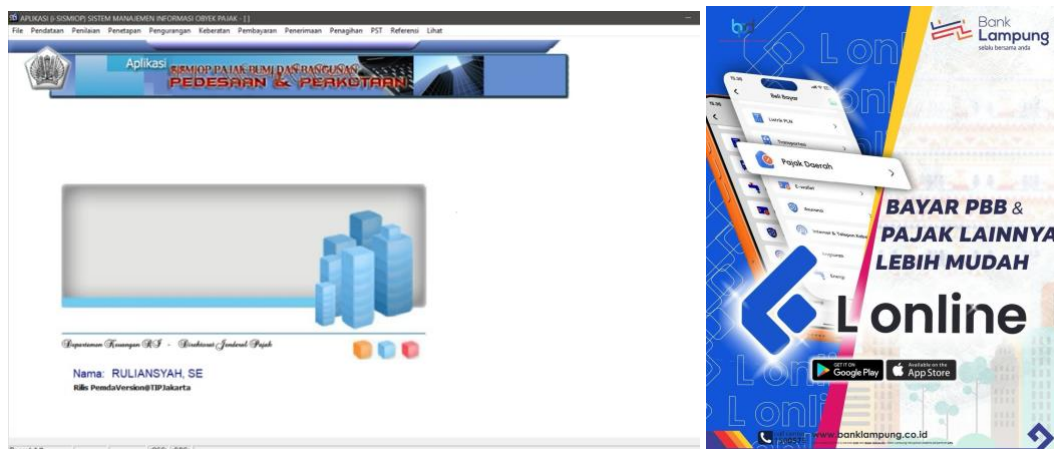
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung transformasi digital di bidang perpajakan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah telah mengembangkan inovasi PBB Online. Inovasi ini dirancang sebagai solusi atas keterbatasan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara konvensional yang selama ini memerlukan kehadiran langsung wajib pajak ke loket pembayaran.

PBB Online merupakan sistem pembayaran PBB yang dapat diakses melalui aplikasi Lampung Online dan KRIS, yang dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan PT Bank Lampung. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara non tunai melalui berbagai kanal perbankan, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan PBB Online memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan akses layanan. Wajib pajak tidak lagi dibatasi oleh waktu dan lokasi pembayaran, karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat membantu masyarakat, terutama yang berada di wilayah geografis yang relatif jauh dari pusat pelayanan.

Selain meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, inovasi PBB Online juga berdampak pada peningkatan efisiensi administrasi pengelolaan pajak daerah. Proses pencatatan dan pelaporan pembayaran menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas data penerimaan pajak daerah.

Dengan diterapkannya PBB Online, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta berkontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara berkelanjutan.



2. PM Santun (Pajak Mandiri dengan Sistem Aplikasi Non Tunai)

Sebagai upaya lanjutan dalam memperkuat sistem pelayanan perpajakan daerah berbasis digital, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mengembangkan inovasi PM Santun (Pajak Mandiri dengan Sistem Aplikasi Non Tunai). Inovasi ini merupakan bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

PM Santun dirancang sebagai aplikasi pembayaran pajak daerah non tunai yang mampu menyajikan data realisasi pajak secara real time, cepat, dan akurat. Aplikasi ini memungkinkan proses pemungutan pajak dilakukan secara lebih efektif, karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah.

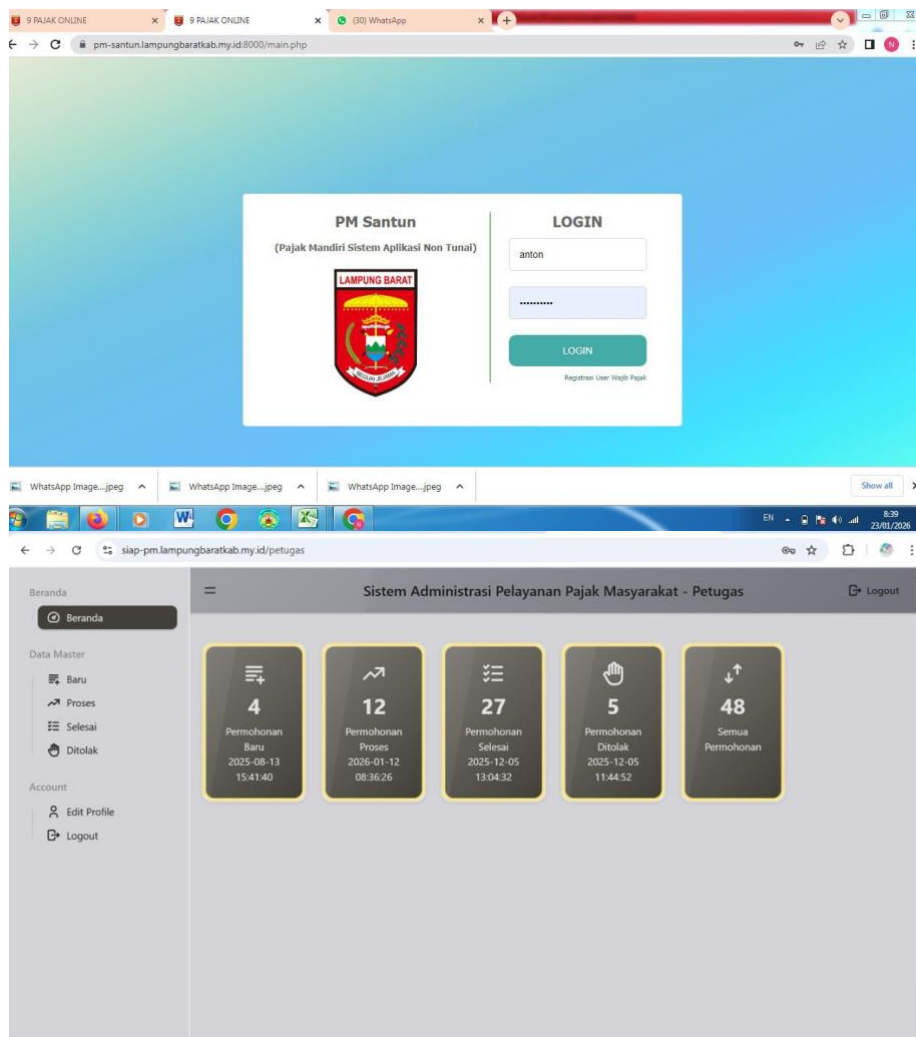
Aplikasi PM Santun terintegrasi dengan aplikasi Lampung Online milik Bank Lampung, sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah secara mandiri. Integrasi ini menciptakan sistem layanan yang lebih sederhana, efisien, dan ramah pengguna, sekaligus meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.

Dari sisi pemerintah daerah, penerapan PM Santun memberikan manfaat strategis berupa tersedianya data penerimaan pajak yang akurat dan dapat diakses secara cepat. Data tersebut menjadi dasar yang penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan kebijakan, serta pengendalian dan pengawasan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.



Badan Pendapatan Daerah

Melalui implementasi PM Santun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat berharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, memperkuat transparansi pengelolaan pajak daerah, serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Inovasi ini menjadi salah satu wujud nyata peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang modern, profesional, dan akuntabel.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Hal ini tercermin dari berbagai capaian kinerja yang signifikan, baik pada aspek fasilitatif maupun substantif, sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan berikut:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada tujuan strategis yaitu: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator "Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah" dengan target 6% tahun 2025 terealisasi sebesar 9,33% Tercapai dari target yang telah ditetapkan.
 - b. Pada sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan PAD dengan target 6% terealisasi sebesar 126,06 %

Adanya peningkatan Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 mencapai 126,06%, jauh melampaui target kinerja sebesar 6% yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat disebabkan oleh beberapa faktor kebijakan. Sejak Mei 2025, sejalan dengan pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen PKB dan BBNKB). Kebijakan tersebut mengakibatkan kendaraan bermotor dengan kode seri Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pembayaran PKB maupun proses Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan pungutan tambahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan tambahan dimaksud dicatat dan dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.



- c. Pada Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.981.584.800,-** (*Lima miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,99% atau sebesar **Rp. 5.682.121.842,-** (*Lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai target kinerja pada tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh factor-faktor antara lain:

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemanfaatan teknologi secara optimal dan bertanggung jawab memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam peningkatan akurasi pengelolaan data pendapatan, percepatan pelayanan kepada wajib pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dukungan teknologi juga memungkinkan peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
2. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan faktor strategis yang dapat menjadi peluang dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Salah satu kebijakan yang memberikan dampak positif adalah pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di mana kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi PBB secara mandiri, sehingga dapat mendorong optimalisasi penerimaan PAD melalui penyesuaian kebijakan pemungutan, peningkatan basis data pajak, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Ketersediaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Badan Pendapatan Daerah didukung oleh dua sumber daya utama, yaitu sumber daya aparatur dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Ketersediaan aparatur yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai merupakan



prasyarat penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA. Apabila kedua sumber daya tersebut dikelola dan dioptimalkan secara terencana dan berkelanjutan, maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian target pendapatan daerah.

C. Permasalahan

Dalam upaya pencapaian indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, masih terdapat sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **Belum Optimalnya Penggalian dan Pengelolaan Potensi PAD**

Target peningkatan PAD berpotensi tidak tercapai akibat belum optimalnya penggalian dan pengelolaan potensi daerah sebagai sumber PAD.

2. **Rendahnya Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah**

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencerminkan masih terbatasnya tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri.

3. **Kerentanan Pendapatan Daerah terhadap Faktor Eksternal**

Pendapatan daerah memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dinamika eksternal, baik yang bersumber dari kondisi ekonomi nasional maupun global. Situasi force majeure seperti pandemi penyakit dan bencana alam dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan realisasi PAD serta berkurangnya pendapatan transfer akibat kebijakan penyesuaian fiskal, seperti pemberian stimulus pajak dan refocusing anggaran pemerintah.

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan sebagai rekomendasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat, antara lain:



1. Melaksanakan pendataan, pemutakhiran, dan pemetaan potensi PAD secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak dan retribusi daerah.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan alokasi Dana Perimbangan serta dengan Pemerintah Provinsi terkait Dana Bagi Hasil guna menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.